

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Pengertian Konflik

Secara sederhana konflik, ialah pertentangan, pertikaian, persengketaan, perselisian, dan percekocokan.<sup>29</sup> Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. oleh karena itu, konflik di identikkan dengan tindak kekerasan.<sup>31</sup>

Konflik menurut Karl Marx, hakekat kenyataan sosial adalah konflik. konflik ialah satu kenyataan sosial yang bisa ditemukan dimana-mana. Bagi Karl Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan asset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam yakni konflik antara individu, konflik antara kelompok, dan bahkan konflik antara bangsa.

---

<sup>29</sup> Pius A Partanto, *Kamus Ilmia Populer*, Surabaya: Arkola, 1994), hal. 358.

<sup>30</sup> W. J. S. Perwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka, 1984),hal.289.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: rajawali pers,1992), hal.86.

Tetapi bentuk konflik yang paling menonjol menurut Karl Mark, adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material,<sup>32</sup>

Konflik menurut Daniel Webster, mendefinisikan konflik sebagai berikut yaitu:

1. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain.
2. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya pertentangan pendapat kepentingan, atau pertentangan individu).
3. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan. perseteruan,

Relp Dahrendorf, membahas suatu tendensi yang melekat pada konflik didalam masyarakat. kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan akan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan kelompok yang tak memiliki kekuasaan akan berjuang, dan kepentingan-kepentingan mereka sering berbeda, bahkan saling bertentangan. Cepat atau lambat menurut Dahrendorf didalam beberapa sistem yang kekuasaannya kuat mungkin secara cermat membuat kubu-keseimbangan antara kekuasaan dan perubahan oposisi, dan masyarakat berubah. Jadi, konflik adalah “kekuasaan yang kreatif dari sejarah manusia”<sup>33</sup>

Dari uraian di atas kesimpulannya, konflik ialah proses atau keadaan dimana dua atau lebih dari pihak-pihak itu melakukan persaingan, pertentangan, perselisihan dan perseteruan. Berusaha menggagalkan tujuan

---

<sup>32</sup> George Ritzer dan Douglas J. Gooman. *Teori Sosiologi Modern*.(Jakarta: Prenada Media.2004), hal .73

<sup>33</sup> Ibid hal. 153

masing-masing pihak dan hal itu merupakan “kekuasaan yang kreatif dari sejarah manusia”

Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Konflik dapat bersifat tertutup (latent), dapat pula bersifat terbuka (manifest). Konflik berlangsung sejalan dengan dinamika masyarakat. Hanya saja, terdapat katup-katup sosial yang dapat menangkai konflik secara dini, sehingga tidak berkembang meluas. Namun ada pula faktor-faktor di dalam masyarakat yang mudah menyulut konflik menjadi berkobar sedemikian besar, sehingga memporakporandakan rumah, harta benda lain dan mungkin juga penghuni sistem sosial tersebut secara keseluruhan

## **2. Bentuk-bentuk Konflik**

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, tentu kita harus mengetahui apa yang menjadi motif konflik itu sendiri. Dalam pandangan sosiologi, masyarakat itu selalu dalam perubahan dan setiap elemen-elemennya selalu memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik. Collins menyetakan bahwa konflik berakar pada masalah individual karena akar teoritisnya lebih pada fenomenologis.

Menurut Collins, konflik sebagai fokus berdasarkan landasan yang realistik dan konflik adalah proses sentral dalam kehidupan sosial. Salah satu bentuk terjadinya konflik adalah karena ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan manusia seperti aspek sosial, ekonomi dan kekuasaan. misalnya kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak

seimbangan terhadap sumber daya yang kemudian akan menimbulkan masalah-masalah dalam masyarakat. Konflik dapat juga terjadi karena adanya mobilisasi sosial yang memupuk keinginan yang sama.<sup>34</sup>

Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan Negara.<sup>35</sup>

Adapun bentuk-bentuk terjadinya konflik sebagai berikut:

- a. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

---

<sup>34</sup> Ritzer, George. dan Douglas J. Gooman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 135-136

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992). hal. 86

- b. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi factor bentuk konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
- c. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
- d. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.

Relf Dahrendorf mengklasifikasikan kondisi-kondisi dimana kepentingan laten itu menjadi kepentingan manifest dan kelompok semu dapat diubah menjadi kelompok kepentingan yaitu:

### 1. Kondisi Teknis

Ralf Dahrendorf mendiskusikan munculnya pemimpin dan pembentukan ideologi. Keduanya dianggap penting untuk pembentukan kelompok konflik dan tindakan kolektif. Tidak ada tindakan kelompok yang diorganisasi dapat terjadi tanpa suatu tipe kepemimpinan dan suatu bentuk kepercayaan yang membenarkan atau ideologi.

### 2. Kondisi Politik

Ralf Dahrendorf menekankan pada tingkat kebebasan yang ada untuk pembentukan kelompok dan tindakan kelompok.

### 3. Kondisi Sosial

Meliputi tingkat komunikasi antaranggota dari suatu kelompok semu. Kelompok konflik tidak akan muncul di antara orang-orang yang terpencil satu sama lain secara ekologis tidak mampu membentuk ikatan sosial.<sup>36</sup>

Taylor dan Hudson (dalam Syahbana: 1999), mengkategorikan lima indikator dalam menggambarkan intensitas konflik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Kelima Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Demonstrasi (*a protest demonstration*).

Dewasa ini, demonstrasi menjadi fenomena sosial yang terjadi hampir setiap hari. Demonstrasi dilakukan oleh sejumlah orang

---

<sup>36</sup> George Ritzer dan Douglas J. Gooman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 21

yang memiliki kepedulian yang sama untuk melakukan protes melalui tindakan tanpa kekerasan. Protes tersebut diarahkan terhadap suatu rezim, pemerintah, atau pimpinan dari rezim atau pemerintah tersebut, atau terhadap ideologi, kebijaksanaan, dan tindakan baik yang sedang direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan. Misalnya, demonstrasi yang dilakukan oleh para guru terhadap rancangan undang-undang guru dan dosen.<sup>37</sup>

## 2. Kerusuhan

Kerusuhan pada dasarnya sama dengan demonstrasi, namun memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Demonstrasi adalah protes tanpa kekerasan sedangkan kerusuhan adalah protes dengan penggunaan kekerasan yang mengarah pada tindakan anarkis. Kerusuhan biasanya diikuti dengan pengrusakan barang-barang oleh para pelaku kerusuhan, yang seringkali menimbulkan penyiksaan dan pemukulan atas pelaku-pelaku kerusuhan tersebut. Penggunaan alat-alat pengendalian kerusuhan oleh para petugas keamanan di satu pihak, dan penggunaan berbagai macam senjata atau alat pemukul oleh para pelaku kerusuhan di lain pihak. Kerusuhan biasanya ditandai oleh spontanitas sebagai akibat dari suatu insiden dan perilaku kelompok yang kacau.

---

<sup>37</sup> Lihat Sunardi, *Keselamatan kapitalisme dan kekerasan*, (LKIS, Yogyakarta, 1996), hal 169

### 3. Serangan bersenjata (*armed attack*)

Serangan bersenjata adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk suatu kepentingan dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kelompok lain. Serangan bersenjatan ini seringkali ditandai oleh terjadinya pertumpahan darah, pergulatan fisik, atau pengrusakan barang-barang, sebagai akibat dari penggunaan alat atau senjata yang dipakai para penyerang.

### 4. Kematian

Kematian yang dimaksud adalah sebagai akibat dari adanya konflik yang direspon melalui demonstrasi, kerusuhan, maupun serangan bersenjata. Konflik yang menyebabkan munculnya kematian menunjukkan indikator tingkatan konflik yang memiliki intensitas tinggi.

## **3. Latar Belakang Terjadinya Konflik**

Dalam faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan, dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik antar warga dua dusun.

Konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa berlatar belakang ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, dan kepentingan lainnya. Menurut DuBois dan Miley, sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap



hak-hak individu dan kelompok, dan tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.

Menurut perspektif sosiologi (Soekanto, 2002: 98), konflik di dalam masyarakat terjadi karena pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan badaniah, emosi, unsure-unsur kebudayaan pola perilaku dengan pihak lain. Konflik atau pertentangan adalah suatu proses dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Ralf Dahrendorf, mengemukakan ciri-ciri konflik dalam organisasi sosial sebagai berikut:

1. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik.
2. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat.
3. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling bertentangan.
4. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan deferensial distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkuasa dan dikuasai.
5. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru yang saling bertentangan, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan konflik.

6. Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada berbagai tipe pola-pola yang telah melembaga.<sup>38</sup>

Lan Craib, mencoba merumuskan teori perbedaan antara teori fungsionalisme struktural yang dinamainya sebagai teori consensus dengan teori konflik:

Teori Konsensus.	Teori Konflik.
Norma-norma dan nilai-nilai adalah unsur dasar kehidupan sosial.	Kepentingan adalah unsur kehidupan sosial.
Kehidupan sosial melibatkan komitmen.	Kehidupan sosial melibatkan dorongan.
Masyarakat perlu kohensif.	Kehidupan sosial perlu terbagi.
Kehidupan sosial tergantung solidaritas.	Kehidupan sosial melahirkan oposisi.
Kehidupan sosial didasarkan pada repositas dan kerjasama	Kehidupan sosial melahirkan konflik.
Sistem-sistem sosial bertahan pada consensus.	Kehidupan sosial melahirkan kepentingan-kepentingan bagian.
Masyarakat mengenal otoritas legitimasi.	Diferensiasi sosial melibatkan kekuasaan.
	Sistem sosial tidak terintegrasi dan ditimpa oleh kontradiksi-

<sup>38</sup> Dalam Soekanto, *Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hal 79

	kontradiksi. Sistem sosial cenderung berubah. <sup>39</sup>
--	---

Sebagai salah satu bentuk hubungan sosial, konflik mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah hubungan sosial dapat disebut konflik.

Ted Robert Gurr, menyebut ada paling tidak empat ciri konflik yaitu:

1. Ada dua atau lebih pihak yang terlibat.
2. Mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi.
3. Mereka menggunakan tindakan-tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya.
4. Interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang independen.<sup>40</sup>

Dikehidupan masyarakat tidak sepenuhnya terlepas konflik. hal ini senada dengan pandangan pendekatan teori konflik dalam anggapan dasar sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak berakhir.

<sup>39</sup> Lan Craib. *Teori-teori Sosial Modern*. Dari Parson sampai Habermas, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hal.91

<sup>40</sup> Maswadi. Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Teoriti*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hal.7

2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.
3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang-orang lain.

Suatu konflik yang terjadi antar kelompok menjadi tidak sehat apabila masing masing pihak didalam mencari pemecahannya tidak lagi bersifat rasional tapi lebih bersifat emosional, akibatnya terjadi konflik antar warga dua dusun. Kekerasan sudah dijadikan sebagai media penyelesaian masalah.<sup>41</sup>

Theodore M Newwcomb. dkk, mengemukakan dalam kondisi-kondisi tertentu pada individu-individu terdapat penurunan ambang-ambang tingkah laku kekerasan dalam bentuk-bentuk yang lebih ekstrem daripada yang dibenarkan oleh norma-norma yang biasanya mengatur kehidupan sehari-hari mereka. kondisi- kondisi ini meliputi:

1. Suatu keadaan prasangka bersama yang telah ada sebelumnya terhadap kelompok dimana korban keganasan itu menjadi anggota.
2. Suatu situasi sesaat yang bertindak meningkatkan rasa terancam yang sudah ada yang disebabkan oleh kelompok lain.

---

<sup>41</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 16

3. Penegasan situasi sesaat sebagai situasi yang membenarkan penggunaan sejumlah norma-norma yang memaafkan kekerasan (norma-norma telah dimiliki bersama tersedia untuk hal-hal seperti itu).
4. Bertambahnya sifat mudah terangsang yang diekspresikan dalam tingkah laku dengan cara-cara yang dikuasai secara sempit dan eksklusif oleh sesuatu norma- norma yang membenarkan kekerasan.<sup>42</sup>

Dua kondisi yang pertama mendahului meletusnya kekerasan dan dua kondisi yang terakhir timbul dalam proses-proses interaksi terutama proses fasilitasi dan perkuatan kelompok. Konflik dalam masyarakat akan selalu ada, hal ini dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang berbeda-beda dan antara kepentingan yang satu dengan yang lain seringkali bersinggungan sehingga terjadi konflik.<sup>43</sup>

Menurut Robbins (1996. 150), konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya (*antecedent conditions*). Kondisi tersebut, yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu: komunikasi, struktur, dan variabel pribadi.

1. *Komunikasi*. Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalah pahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang

---

<sup>42</sup> Newcomb, Theodore M, dkk. *Psikologi Sosial*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1978), hal. 591

<sup>43</sup> Tom. Campbell, *Tujuh Teori Sosial*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hal. 134-136

terhadap komunikasi dan menjadi kondisi anteseden untuk terciptanya konflik.

2. *Struktur*. Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup: ukuran (kelompok), derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan jurisdiksi (wilayah kerja), kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan derajat ketergantungan antara kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran kelompok dan derajat spesialisasi merupakan variabel yang mendorong terjadinya konflik. Makin besar kelompok, dan makin terspesialisasi kegiatannya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik.
3. Penyebab konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi: sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan (*idiosyncrasies*) dan berbeda dengan individu yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa tipe kepribadian tertentu, misalnya, individu yang sangat otoriter, dogmatik, dan menghargai rendah orang lain, merupakan sumber konflik yang potensial.

Jika salah satu dari kondisi tersebut terjadi dalam kelompok, dan para karyawan menyadari akan hal tersebut, maka muncullah persepsi bahwa di dalam kelompok terjadi konflik. Keadaan ini disebut dengan konflik yang dipersepsikan (*perceived conflict*). Kemudian jika individu

terlibat secara emosional, dan mereka merasa cemas, tegang, frustrasi, atau muncul sikap bermusuhan, maka konflik berubah menjadi konflik yang dirasakan (*felt conflict*). Selanjutnya, konflik yang telah disadari dan dirasakan keberadaannya itu akan berubah menjadi konflik yang nyata, jika pihak-pihak yang terlibat mewujudkannya dalam bentuk perilaku. Misalnya, serangan secara verbal, ancaman terhadap pihak lain, serangan fisik, huru-hara, pemogokan, dan sebagainya.

Dalam sosiologi, konflik merupakan gambaran tentang terjadinya percekocan, perselisihan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan secara individual maupun perbedaan kelompok. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan atau perbedaan yang lebih luas dan umum, seperti perbedaan agama, ras, suku bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan kepercayaan. Sumber terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat dapat dikategorikan ke dalam berbagai faktor yang melatar belakangi yaitu:

1. Adanya perbedaan kepribadian, pendirian, perasaan atau pendapat antar individu yang tidak mendapat toleransi di antara individu tersebut, sehingga perbedaan tersebut semakin meruncing dan mengakibatkan munculnya konflik pribadi.

2. Adanya perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi perilaku dan pola berpikir sehingga dapat memicu lahirnya pertentangan antar kelompok atau antar masyarakat.
3. Adanya perbedaan kepentingan atau tujuan di antara individu atau kelompok, baik pada dimensi ekonomi dan budaya maupun politik dan keamanan.
4. Adanya perubahan sosial yang relatif cepat yang diikuti oleh adanya perubahan nilai atau sistem sosial. Hal ini akan menimbulkan perbedaan pendirian di antara warga masyarakat terhadap reorganisasi dari sistem nilai yang baru tersebut, sehingga memicu terjadinya disorganisasi sosial.
5. Persaingan Ekonomi

Simmel dalam Veeger, menyebutkan persaingan individu-individu dibidang ekonomi, persaingan memang salah satu bentuk konflik antar orang, tetapi kalau dilihat dalam keseluruhan interaksi yang membentuk masyarakat, persaingan merupakan relasi yang memainkan peranan positif bagi seluruh group. Kemudian Veblen dalam K.J Veeger (1990: 104) menggambarkan bahwa konflik bukan atas modal dan kerja, melainkan antara *businnes* yang mencapai keuntungan dan industri, yaitu produksi maksimal barang dan jasa,



bahkan di zaman primitive pihak saingan atau musuh dibunuh saja oleh pihak lebih yang kuat.<sup>44</sup>

Kemudian Hawari dalam (buku: kekerasan antar kelompok, mengatakan faktor ekonomi sangat mempengaruhi timbulnya kenakalan atau tindakan yang bertentangan dengan norma.

Dalam masyarakat, konflik selalu akan mewarnai fenomena sosial yang terefleksikan sebagai fakta sosial. Konflik sebagai proses sosial akan selalu berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat karena masyarakat bersifat dinamis. Dinamika tersebut merupakan jawaban atas tuntutan kehidupan baik secara pribadi maupun kelompok. Hal ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang diorganisasikan oleh norma dan nilai sosial. Anda sebagai mahasiswa dan kaum terpelajar tidak harus menjadikan konflik sebagai fobia dalam kehidupan, melainkan mencari solusi untuk mengorganisasikan konflik sebagai motivasi kemajuan diri dan masyarakat. Dalam hal ini, Anda memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang memiliki kemampuan partisipatif. Anda harus memiliki kepedulian terhadap konflik, di antaranya sebagai sumber belajar dan sumber pemberdayaan diri yang dapat disumbangkan bagi masyarakat. Artinya, konflik akan selalu

---

<sup>44</sup> Karel J Veeger, *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama-APTIK, 1997), hal. 94-97

terjadi pada diri seseorang dan di dalam masyarakat, konflik tidak untuk dihindari melainkan diatasi karena konflik merupakan proses social.<sup>45</sup>

#### **4. Dampak Dari Adanya Konflik**

Dampak adalah sesuatu yang dimungkinkan sangat mendatangkan akibat atau sebab yang membuat terjadinya sesuatu, baik yang membuat terjadinya sesuatu baik yang bersifat positif maupun negatif. Menurut Richard Nelson Jones (1996: 303) dampak negatif dari konflik adalah banyak dan bervariasi. Konflik dapat menyebabkan kesengsaraan jiwa yang mendalam. suatu hubungan yang menawarkan peluang yang cerah bagi kedua belah pihak dapat saja berubah menjadi buruk karena konflik tidak dikendalikan secara efektif. Keluarga dapat menjadi hancur, perkawinan retak, dan kondisi kejiwaan anak-anak menjadi terancam. Pada tingkat yang lebih mendalam, konflik dapat memperburuk suatu hubungan dan menyebabkan keretakan hubungan, meninggalnya salah satu nyawah, luka kecil, atau serius terbukti menimbulkan keresahan bagi seluruh warga masyarakat di kedua desa tersebut.

Menurut Daniel Webster (2001: 1) konflik dapat ditujukan pada kebaikan maupun keburukan. Konflik itu sendiri mungkin sangat diharapkan. Arah konflik itu dapat bersifat destruktif. Lebih mudah untuk menyatakan aspek negatif dari suatu konflik.

Untuk memperbaiki keseimbangannya ada empat aspek positif dalam konflik yaitu:

---

<sup>45</sup> From Erich, *Akar Kekerasaan*. (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2000.), hal. 71

#### 1. Keyakinan yang Lebih Besar

Konflik dapat membangun keyakinan. Orang yang dapat berhubungan walaupun memiliki perbedaan, demikian juga orang yang dapat bekerja melalui perbedaan itu, akan merasakan bahwa hubungan mereka lebih aman dari pada hubungan orang-orang yang tidak mengalami hal tersebut.

#### 2. Meningkatnya Tali Keeratan

Aspek penting dari adalah kemampuan untuk memberi dan menerima umpan balik yang jujur. Tenggang rasa yang ikhlas dapat terjadi bila setiap pihak dapat saling terbuka dan bekerja melalui perbedaan mereka daripada hanya memperbesar peretentangan mereka.

#### 3. Meningkatnya Harga Diri.

Warga masyarakat yang dapat mengendalikan konflik mereka secara efektif dapat menegakan harga diri mereka karena sejumlah alasan. Mereka mengetahui bahwa hubungan mereka cukup kuat untuk mempertahankan konflik. Warga masyarakat akan mendapatkan hal-hal yang bernilai dalam pengendalian konflik.

#### 4. Penyelesaian yang Kreatif

Arah konflik yang produktif dapat dipandang sebagai proses pemecahan masalah yang terpadu. Pemecahan yang kreatif yang memnuhi kebutuhan kedua belah pihak, terkadang disebut penyelesaian “menang-menang”, dapat menjadi jalan keluar bagi

proses ini. Lawan dari penyelesaian “menang-menang” adalah penyelesaian “kalah-kalah” dimana tak seorang pun yang memperoleh manfaat.

Menurut Soerjono Soekanto, akibat negatif yang timbul dari sebuah konflik sosial sebagai berikut:

1. Bertambahnya solidaritas anggota kelompok yang berkonflik

Jika suatu kelompok terlibat konflik dengan kelompok lain, maka solidaritas antar warga kelompok tersebut akan meningkat dan bertambah berat. Bahkan, setiap anggota bersedia berkorban demi keutuhan kelompok dalam menghadapi tantangan dari luar.

Jika konflik terjadi pada tubuh suatu kelompok maka akan menjadikan Keretakan dan keguncangan dalam kelompok tersebut, Visi dan misi dalam kelompok menjadi tidak dipandang lagi sebagai dasar penyatuan. Setiap anggota berusaha menjatuhkan anggota lain dalam kelompok yang sama, sehingga dapat dipastikan kelompok tersebut tidak akan bertahan dalam waktu yang lama.

2. Berubahnya kepribadian individu

Dalam konflik sosial biasanya membentuk opini yang berbeda, misalnya orang yang setuju dan mendukung konflik, ada pula yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak, ada pribadi-pribadi yang tahan menghadapi situasi konflik, akan tetapi ada yang merasa tertekan, sehingga menimbulkan penderitaan pada batinnya dan merupakan suatu penyiksaan mental.

### 3. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa

Setiap konflik yang terjadi umumnya membawa kehancuran dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak yang berkonflik mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan pertikaian. Oleh karenanya, tidak urung segala sesuatu yang ada di sekitar menjadi bahan amukan. Peristiwa ini menyebabkan penderitaan yang berat bagi pihak-pihak yang bertikai. hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa wujud nyata akibat konflik.

### 4. Akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak

Jika setiap pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan seimbang, maka muncullah proses akomodasi. Akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian antara individu dengan individu- individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Ketidak seimbangan antara kekuatan-kekuatan pihak yang mengalami konflik menyebabkan dominasi terhadap lawannya. Kedudukan pihak yang didominasi sebagai pihak yang takluk terhadap kekuasaan lawannya.<sup>46</sup>

Dari keterangan-keterangan di atas dapat dilihat akibat konflik sebagai bentuk interaksi disosiatif. Walaupun begitu tidak selamanya akibat konflik bersifat negatif. Sebagai contohnya, konflik dalam bentuk

---

<sup>46</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu pengantar*.(Jakarta: Rajawali Pers, 1992) , hal. 90

lunak biasanya digunakan dalam seminar-seminar dan diskusi-diskusi sebagai media penajaman konsep-konsep atau persoalan ilmiah. Selain itu, konflik dijadikan sebagai sarana untuk mencapai suatu keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, dapat pula menghasilkan suatu kerja sama di mana masing-masing pihak melakukan introspeksi yang kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dan konflik dapat memberi batas-batas yang lebih tegas, sehingga masing-masing pihak yang bertikai sadar akan kedudukannya dalam masyarakat.

Dalam penyelesaian “menang-kalah” hanya salah satu pihak yang dapat memenuhi keinginannya. dari berbagai dampak konflik diatas ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya berupa dampak psikologis yaitu keadaan trauma, kondisi kejiwaan mereka dalam keadaan sangat mengenaskan, akibatnya merasa panik, trauma, serta tercekam dalam ketakutan.

Dan dampak sosiologis konflik kekerasan itu yaitu pertama kerugian fisik seperti cedera bahkan tewas. Kedua, rusaknya rumah serta fasilitas umum dan juga terganggunya proses pendidikan, berkurangnya penghargaan, toleransi. Untuk memperbaiki keseimbangannya ada empat aspek positif dalam konflik yaitu keyakinan yang lebih besar, Meningkatnya tali keeratan, meningkatnya harga diri, penyelesaian yang kreatif.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Peg, Pickering, *Kiat-kiat Menangani Konflik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001) hal.1

## 5. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Konflik

Secara sosiologis, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik.<sup>48</sup>

Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), *detente*. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama tidak membawa hasil.

Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam yaitu:

### 1. Konsiliasi (*conciliation*)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan

---

<sup>48</sup> Drs Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal, 77

pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

## 2. Mediasi (*mediation*)

Bentuk pengendalian ini dilakukan mana kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama bersepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

## 3. Arbitrasi

Arbitras berasal dari kata Latin *arbitrium*, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

## 4. Perwasitan (*arbitration*)

Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik atau konflik yang terjadi diantara mereka.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hal. 22-25



## 5. Kolaborasi (kerjasama)

Kolaborasi ialah menangani konflik sama-sama menang. Hal ini mencoba mengadakan pertukaran informasi. Ada keinginan untuk melihat sedalam mungkin semua perbedaan yang ada dan mencari pemecahan yang disepakati semua pihak. tindakan ini memecahkan persoalan dan paling efektif untuk persoalan yang kompleks. untuk mendorong orang berpikir kreatif.

Salah satu kelebihan dari seseorang berusaha mencari berbagai alternatif. Semua pihak terdorong untuk mempertimbangkan semua informasi dari berbagai nara sumber dan perspektif. Namun yang tidak efektif bila pihak-pihak yang terlibat konflik tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah atau bila waktu terbatas.

Bila kerjasama diaplikasikan pada tahap konflik lebih tinggi dapat menimbulkan kekecewaan karena logika dan pertimbangan rasional sering dikalahkan oleh emosi yang terkait dengan suatu pendirian atau sikap. kolaborasi menyatukan langkah semua pihak pada upaya mencari pemecahan yang kompleks. Bahwa hal ini tepat digunakan bila seseorang dan masalah jelas terpisah satu dari yang lain, dan biasanya tidak efektif bila pihak-pihak yang bertikai memang ingin beretengkar. akan menjadi motivator positif dalam sesi *brainstroming* atau *problem-solving*

## 6. Kompromi

Tindakan ini berorientasi jalan tengah, karena setiap orang punya sesuatu untuk ditawarkan dan sesuatu untuk diterima. Hal ini sangat efektif bila kedua belah pihak sama-sama benar, tetapi menghasilkan penyelesaian keliru bila salah satu pihak salah.

Tindakan saling berkompromi paling efektif bila persoalan yang dihadapi kompleks atau bila kekuasaan berimbang. Kompromi dapat berarti membagi perbedaan atau bertukar konsensi. Semua pihak jelas harus bersedia mengorbankan sesuatu agar tercapainya penyelesaian. dalam menangani konflik antar warga dua dusun. harus digunakan pendekatan-pendekatan tertentu yang memungkinkan terwujudnya kembali kedamaian. untuk itu dibutuhkan adanya pihak sebagai penengah.

Dalam menangani konflik antar warga dua dusun harus digunakan pendekatan-pendekatan tertentu yang memungkinkan terwujudnya kembali kedamaian. Untuk itu dibutuhkan adanya pihak ketiga ketiga sebagai penengah. Deutsch (dalam WFG Masternbroek. 1986: 197) memberikan iktisar tentang kesepakatan mengenai bertindaknya pihak ketiga:

1. Menerangkan titik pertikaian yang terpenting
2. Menciptakan keadaan-keadaan yang baik untuk menangani titik-titik pertikaian
3. Memperbaiki saling komunikasi

4. Menumbuhkan aturan-aturan penanganan konflik selanjutnya
5. Membantu menetapkan pemecahan-pemecahan alternative
6. Membantu menetapkan pemecahan-pemecahan alternative
7. Membantu supaya pemecahannya dapat diterima

Satjipto Rahardjo (2002: 96-97) bahwa: “penjagaan keamanan tidak bisa lagi dilaksanakan secara spesialis, formal, birokratis, melainkan harus bersama-sama dengan rakyat”. Jadi antara pemuda, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan aparat penegak hukum harus memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat.

Jadi upaya yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam menangani konflik antar warga desa adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan penyuluhan tentang kesadaran hukum pada masyarakat.
2. Mempertemukan pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengadakan diskusi.
3. Menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah.
4. Memperdayakan kegiatan sikamling

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Kajian Teori Konflik Ralf Dahrendorf**

Teori yang digunakan untuk menyelesaikan fenomena konflik antar warga dua dusun. ini tidak lain adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, karena muncul sebagai reaksi atas teori

fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat.

Teori fungsionalisme structural adalah teori dominan di dalam sosiologi, karena mempunyai pandang luas dalam ilmu sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi, dan institusi, fungsionalisme struktural telah berkuasa sebagai suatu paradigma atau atau model teoritis yang dominan didalam sosiologi.<sup>50</sup>

Teori konflik adalah penantang utamanya dan menjadi alternative menggantikan posisi dominant itu, dalam teori konflik ini setiap orang mempunyai angka dasar kepentingan, mereka ingin dan mencoba mendapatkannya dimana masyarakat selalu terlibat dalam situasi yang di ciptakan oleh keinginan-keinginan dalam setiap orang dalam meraih kepentingannya, dan pusat pada persepektif teori konflik secara keseluruhan adalah suatu pemusatan pada kekuasaan atau otoritas sebagai inti dari hubungan sosial.<sup>51</sup>

Konflik sosial adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan keentingan yang sangat mendasar. Sehingga menimbulkan adanya semacam adanya gap atau semacam jurang pemisahyang menganjal interaksi sosial di antara

---

<sup>50</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2000), hal.129.

<sup>51</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hal.71.

mereka yang bertikai tersebut. upaya untuk menghilangkan ganjalan tersebut dilakukan oleh masing-masing pihak melalui cara-cara yang tidak wajar, tidak konstitusional sehingga menimbulkan adanya semacam pertikaian kearah bentuk fisik dan kepentingan yang saling menjatuhkan.<sup>52</sup>

Teori konflik bertujuan mengatasi watak yang secara dominant bersifat arbiter dari peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak dapat dijelaskan dengan menurunkan peristiwa-peristiwa tersebut dari elemen-elemen struktur sosial.<sup>53</sup>

Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, seringkali disebut teori konflik dialektik. Bagi Dahrendorf, masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan konsensus. tidak akan mengalami suatu konflik jika sebelumnya tidak ada konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsesus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralf Dahrendorf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsesus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidak bebasan yang dipaksakan. dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.<sup>54</sup>

Teori konflik adalah suatu tatanan sosial yang dilihat sebagai manipulasi dan kontrol dari sekelompok orang yang dominan dan menganggap perubahan sosial terjadi secara cepat. Sedangkan pada teori

---

<sup>52</sup> Ibid Hal. 73

<sup>53</sup> Goodman, Douglas J dan Ritzart, George, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta, Prenada Media Group 2007), hal. 152

<sup>54</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hal. 77

konsensus adalah suatu persamaan nilai dan norma yang dianggap penting bagi perkembangan masyarakat.<sup>55</sup>

Kemudian teori konflik berorientasi ke studi struktur dan instansi sosial. Dalam hal ini teori konflik dan fungsional di seajarkan, yang menurut fungsionalis masyarakat adalah setatis atau mesyarakat berada dalam keadaan berubah secara seimbang, akan menurut teori konflik masyarakat setiap saat akan tunduk pada proses perubahan. Fungsionalisme menekankan pada keteraturan masyarakat, sedangkan konflik melihat konflik dan pertikaian dalam sistem sosial.fungsionalisme menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas, sedangkan teori konflik melihat berbagai element kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan.<sup>56</sup>

Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal di ikat oleh nilai, norma dan nilai, teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat terdapat diri pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas, fungsionalis memusatkan perhatian terhadap kohesi yang di ciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Teori konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Dalam hal itu berarti bahwa dalam masyarakat ada beberapa posisi yang mendapatka kekuasaan dan otoritas untuk menguasai orang lain

---

<sup>55</sup> Lan Craib, *Teori-teori Sosial Modern*, dari Parson sampai Habermas, (Jakarta: CV Rajawali, 1986),hal. 92

<sup>56</sup> Ibid hal, 94

<sup>57</sup> George ritzart, Douglas J. Goodman, *teori sosiologi modern*, prenada media group.(Jakarta, Prenada Media Group 2007), hal.153

sehingga kestabilan bias di capai. Faktor sosial ini mengarahkan pada tesisnya, bahwa distribusi otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda merupakan factor yang menentukan bagi terciptanya konflik sosial yang sistematis, yang menurutnya berbagai posisi yang ada didalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan institusi yang berbeda.

Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan, kekuasaan biasanya cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasi atau kekuasaan yang mendapat pengakuan umum.

Kekuasaan atau otoritas tidak bersifat tetap karena melekat pada posisi dan bukan pada pribadi, orang biasa saja berkuasa atau mempunyai otoritas dalam latar belakang tertentu dan tidak mempunyai kekuasaan atau otoritas tertentu dalam latar belakang yang lain misalnya: dalam kelas seorang dosen mempunyai otoritas atas mahasiswanya akan tetapi dalam pengaturan lain, mahasiswa juga mempunyai otoritas atas dosennya, dimana sang dosen adalah salah seorang diantara audiensinya.

Implikasi Fungsionalis dalam Pendekatan Ralf Dahrendorf Perhatian pada umumnya adalah pada struktur otoritas, bukan hubungan kekuasaan murni. Dalam pandangannya, kontrol atas alat produksi mencerminkan struktur otoritas yang melembaga dan bukan dominasi yang semata-mata didasarkan pada kekuasaan. Tekanan Ralf Dahrendorf pada struktur otoritas yang melembaga mengungkapkan faktor-faktor materiil yang riil yang mendasari struktur otoritas dan semua pola

institusional. Ralf Dahrendorf menekankan kepentingan-kepentingan yang saling konflik melekat dalam hubungan apa saja antara mereka yang menggunakan otoritas yang sah dan mereka yang tunduk padanya. Dalam setiap hubungan atau organisasi tertentu pasti akan ada sesuatu perbedaan dikotomi yang jelas antara mereka yang menggunakan otoritas dan mereka yang tunduk pada penggunaan otoritas tersebut. Perbedaan ini didasarkan terutama pada posisi yang sudah melembaga dan sah dalam asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif. Peran yang dimainkan individu, apakah dominasi atau kepatuhan, dikaitkan dengan posisi yang mereka tempati.<sup>58</sup>

## **2. Otoritas Menurut Ralf Dahrendorf**

Ralf Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih luas, inti tesisnya adalah bahwa berbagai posisi didalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas berbeda tak tertarik pada struktur posisi saja tetapi juga pada konflik antar berbagai struktur posisi itu. Sumber struktur konflik harus di cari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan (1959:163)

Menurut Ralf Dahrendorf tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi beberapa peran otoritas di dalam masyarakat. Otoritas yang melekat pada posisi adalah merupakan unsure kunci dalam analisis Ralf Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan super Ordinasasi dan Subordinasi mereka yang menduduki posisi otoritas diharap mengendalikan bawahan yang artinya mereka berkuasa karena harapan

---

<sup>58</sup> Ibid hal. 155



dari orang yang berada di sekitar mereka bukan karena ciri-ciri psikologinya.<sup>59</sup>

Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Ralf Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan otoritas dan konflik sosial bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain.<sup>60</sup>

Ralf Dahrendorf, meringkaskan asumsi mengenai teori konflik diantaranya:

1. Setiap masyarakat kapan saja akan mengalami proses perubahan.
2. Setiap masyarakat kapan saja bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik.
3. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan.
4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

---

<sup>59</sup> Goerge Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Gandah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 79-80

<sup>60</sup> Ibid, hal. 97.

Teori konflik umumnya mengarahkan perhatiannya pada kepentingan-kepentingan kelompok dan orang yang saling bertentangan dalam struktur sosial dan pada cara dimana konflik kepentingan ini menghasilkan suatu perubahan yang konsisten. Apabila angka perubahan tersebut minimal, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan konsensus melainkan dengan keberhasilan kelompok yang lebih kuat dalam memaksakan kehendaknya atau memenangkan dukungan dari sebagian masyarakat.<sup>61</sup>

Konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa sekali kelompok-kelompok yang bertentangan muncul, maka mereka akan terlibat dalam tindakan-tindakan yang terarah kepada perubahan di dalam struktur sosial, jika konflik itu adalah intensif atau hebat, maka perubahan yang terjadi akan bersifat radikal. dan jika konflik itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan maka akan terjadi perubahan struktur akan tiba-tiba.<sup>62</sup>

### **3. Kelompok Semu dan Kelompok Kepentingan**

Kepentingan kelas objektif yang ditentukan secara struktural yang tidak disadari oleh individu disebut Dahrendorf dengan kepentingan laten (*latent interest*), dimana kepentingan itu tidak dapat menjadi dasar yang jelas dalam pembentukan kelompok. Para anggota di dalam asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif itu memiliki kepentingan laten yang sama dapat dipandang sebagai kelompok semu (*quasi-group*). Sebaliknya,

---

<sup>61</sup> Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hal. 163.

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 28.

kepentingan kelas yang disadari individu terutama kalau kepentingan itu dengan sadar dikejar sebagai tujuan disebut sebagai kepentingan manifest.<sup>63</sup>

Bagi asosiasi apa saja, ada dua kelompok semu yang utama, yaitu mereka yang memiliki posisi dominasi otoritatif dan mereka yang harus tunduk pada penggunaan otoritas tersebut. Kalau orang dalam salah satu kelompok semu mengembangkan suatu kesadaran kelas bersama (kesadaran akan kepentingan bersama) dan mengorganisasikan kegiatan untuk mengejar kepentingan itu akan melahirkan suatu kelompok kepentingan. Meskipun para anggota suatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik diambil dari kelompok semu yang sama, tidak semua orang yang termasuk dalam kelompok semu yang sama itu harus bergabung dalam suatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik untuk mengejar kepentingan kelasnya.<sup>64</sup>

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. kelompok, konflik, dan perubahan. Dibedakan menjadi tiga tipe kelompok yaitu:

1. Kelompok Semu (*quasi group*), yaitu sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, tetapi belum menyadari keberadaannya.

---

<sup>63</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hal. 78

<sup>64</sup> Gritzart, Douglas J. Goodman, *teori sosiologi modern*, prenada media group.(Jakarta,2007), hal.156

2. Kelompok Kepentingan (*manifes*), yaitu kelompok yang memiliki struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan. Kelompok ini merupakan agen riil dari konflik kelompok.<sup>65</sup>
3. Kelompok Konflik, yaitu kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual.<sup>66</sup> Kelompok-kelompok tersebut merupakan konsep dasar untuk menjelaskan konflik sosial. Kelompok dalam masyarakat tidak pernah berada dalam posisi ideal sehingga selalu ada factor yang mempengaruhi terjadinya konflik sosial. Berkaitan dengan ini Dahrendorf mengatakan, jika anggota kelompok direkrut secara acak dan ditentukan oleh peluang, kelompok kepentingan dan kelompok konflik tidak akan muncul. Jika rekrutmen anggota kelompok berdasarkan struktur akan sangat memungkinkan munculnya kelompok kepentingan hingga kelompok konflik.<sup>67</sup>

#### **4. Munculnya Kelompok Kepentingan Konflik**

Dahrendorf mengklasifikasikan kondisi-kondisi dimana kepentingan laten itu menjadi kepentingan manifest dan kelompok semu dapat diubah menjadi kelompok kepentingan yaitu:

1. Kondisiteknis Dahrendorf mendiskusikan munculnya pemimpin dan pembentukan ideologi. Keduanya dianggap penting untuk pembentukan kelompok konflik dan tindakan kolektif. Tidak ada

---

<sup>65</sup> Prof. Dr. Nasrullah Nasir, Ms. *Teori-Teori Sosiologi*, (Penerbit: Widya Padjadjaran, 2009), hal.25

<sup>66</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1994), hal.135.

<sup>67</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 27.

tindakan kelompok yang diorganisasi dapat terjadi tanpa suatu tipe kepemimpinan dan suatu bentuk kepercayaan yang membenarkan atau ideologi.

2. Kondisi Politik Dahrendorf menekankan pada tingkat kebebasan yang ada untuk pembentukan kelompok dan tindakan kelompok.
3. Kondisi Sosial Meliputi tingkat komunikasi antaranggota dari suatu kelompok semu. Kelompok konflik tidak akan muncul di antara orang-orang yang terpencil satu sama lain secara ekologis tidak mampu membentuk ikatan sosial.
4. Kondisi-kondisi ini meskipun perlu untuk pembentukan kelompok konflik, tidak menjamin bahwa suatu kelompok konflik akan terbentuk. Ada juga persyaratan psikologis sosial, yaitu kepentingan laten menjadi manifest. Kepentingan yang didasarkan pada kelas sangat mungkin untuk menjadi manifest dalam kesadaran individu dan merangsang tindakan kelas kalau batas-batas antara kelas tidak dapat ditembus dan angka mobilitasnya rendah. Faktor lain adalah tingkat konsistensi posisi kelas individu dalam asosiasi-asosiasi yang berbeda.

Dahrendorf mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat konsistensinya, semakin besar kemungkinan kesadaran kelas berkembang dan tindakan kelas dijalankan. Dalam situasi seperti itu, konflik mudah dipindahkan dari satu asosiasi ke asosiasi lain. Konflik yang demikian

mencerminkan dan memperkuat munculnya solidaritas kelas dan suatu kebudayaan kelas bersama.

### **5. Intensitas dan Kekerasan Konflik**

Intensitas dan kekerasan dilihat sebagai dua dimensi konflik kelas yang berbeda secara analitis. Intensitas menunjuk pada pengeluaran energi dan tingkat keterlibatan dari pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan konsep kekerasan menunjuk pada alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengejar kepentingannya.

Intensitas dan kekerasan konflik dipengaruhi oleh persebaran penghargaan, fasilitas, pemilikan, dan status sosial umumnya. Karena hubungan-hubungan otoritas dalam asosiasi-asosiasi yang berbeda-beda itu bisa sesuai satu sama lain, maka persebaran imbalan ekonomis dan keselamatan sosioekonomis dapat tumpang tindih dengan persebaran otoritas.<sup>68</sup>

### **6. Pengaturan Konflik dan Kekerasan**

Pengaturan konflik sangat erat kaitannya dengan kondisi politik yang mempengaruhi kesadaran kelas dan pembentukan kelompok kepentingan yang bersifat konflik. Pengaturan konflik menurut Dahrendorf dapat mengurangi kemungkinan kekerasan. Pengaturan konflik didasarkan pada pengakuan yang eksplisit akan kenyataan dan kebenaran adanya

---

<sup>68</sup> Lan Craib, *Teori-teori Sosial Modern*, dari Parson sampai Habermas, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hal. 93

konflik, artinya kedua belah pihak memiliki kepentingan yang saling bertentangan secara sah.<sup>69</sup>

Pengaturan konflik juga menuntut pembentukan kelompok kepentingan yang terorganisasi dan ditegakannya suatu kerangka bersama untuk merembuk perbedaan-perbedaan itu. organisasi kelompok kepentingan itu menyalurkan dan mengontrol ungkapan perlawanan, sedangkan kerangka bersama untuk perembukan memberikan suatu ikatan antara pihak yang berkonflik.

## 7. Perubahan Struktural

Dahrendorf membedakan tiga tipe perubahan struktural, yaitu:

- a. Perubahan keseluruhan personel dalam posisi dominasi.
- b. Perubahan sebagian personel dalam posisi dominasi.
- c. Digabungkannya kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa.<sup>70</sup>

Semakin berhasil kelas yang berkuasa dapat mengikuti strategi yang ketiga, semakin berkurang kemungkinan kedua tipe di atas dapat terjadi. Dahrendorf mengemukakan bahwa perubahan struktural berbeda-beda menurut sifat radikal dan sifat tiba-tiba (sudden). Keradikalan menunjuk pada tingkat perubahan struktural, baik yang berhubungan dengan personel dalam posisi yang berkuasa, kebijaksanaan kelas yang berkuasa, maupun hubungan antarkelas secara keseluruhan. Ketiba-tibaan

---

<sup>69</sup> Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hal. 165

<sup>70</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1994), hal. 135

(suddenes) menunjuk pada kecepatan perubahan struktural. Dahrendorf menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara intensitas konflik kelas dan keradikalan perubahan struktural. Dia menghipotesiskan bahwa kekerasan konflik berhubungan dengan sifat tiba-tibanya perubahan struktural. Perubahan politik revolusioner menggambarkan tipe perubahan ini.<sup>71</sup>

### C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti menganggap penting terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang penulis angkat. Karena dengan hasil penelitian terlebih dahulu akan bisa mendalami tema yang sama tentang konflik, tapi dalam persepektif yang berbeda.

Ahmad Rizal, meneliti tentang “Konflik Sosial Nelayan (Study Kasus Konflik Sosial Nelayan Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampan Dengan Masyarakat Nelayan Desa Sekitar). Bentuk-bentuk konflik sosialnya adalah fisik dan non fisik: adanya penyerbuan yang dilakukan oleh kedua pihak nelayan yang sedang bersengketa sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa maupun luka. Sedangkan dalam bentuk non-fisik yaitu, adanya pembakaran perahu, alat tangkap dan adanya rasa dendam dan saling menghina. Potensi konflik ini di karenakan rendahnya kesadaran yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan ketidak seriusan (Pemkab) pemerintah kabupaten sampan dalam pembagian wilayah perairan laut yang

---

<sup>71</sup> George Ritzer, Douglas J. Goudman. *Teori Sosiologi* (terjemahan: Nurhadi). Bantul: Kreasi Wacana. 2004, hal.153



sesuai dengan Undang-undang otonomi daerah yang memberikan desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan.

Anifatul Khoiriyah, meneliti tentang konflik yang berjudul “Pondok Pesantren At-Thoriyah dan Pengaruhnya Terhadap Konflik Tokoh Masyarakat”. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kekuasaan, kedudukan atau karena memperhatikan identitas diri semata. Manusia berusaha mengaitkan diri agar mendapat hal-hal yang dianggap baik, lalu ada yang lebih di satu pihak menganggap sama mempunyai hal atau hal tersebut kemungkinan akan terjadi suatu.

Lailatur Lathif, meneliti tentang tokoh masyarakat yang dapat menghambat dakwah, berjudul: Dakwah dan Konflik Tokoh Masyarakat (Kajian Tentang Penghambat Dakwah Di Desa Wonokerto, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik). Konflik yang terjadi antara tokoh masyarakat adalah murni karena internal, yaitu karena masalah politik dan kekuasaan, dendam pribadi antara tokoh masyarakat dan masalah perebutan lembaga-lembaga pendidikan. Dengan adanya konflik ini segala aktivitas baik keagamaan yang berbentuk dakwah atau aktivitas sosial lainnya menjadi tidak stabil karena masyarakat tidak ingin hadir dalam kegiatan yang ada.

Berkaitan dengan judul penelitian terdahulu diatas, maka bisa menjelaskan bahwa judul yang diajukan oleh peneliti yaitu “Konflik Antar Warga Dua Dusun (Studi Kasus di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”. Benar-benar belum ada yang meneliti, hal ini yang membuat peneliti ingin melanjutkan penelitiannya. Selain itu, dari judul yang

diajukan sangat menarik. Karena dari sisi kehidupan masyarakat selalu terlibat dalam konflik, baik kepentingan kekuasaan, ekonomi, politik, pertengkarannya, ketidak merataannya infrastruktur pembangunan serta hal tersebut terjadi karena adanya saling tidak baiknya komunikasi, kecemburuan, emosional antara warga kedua dusun tersebut.